

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016/2017 menunjukkan bahwa capaian Angka Partisipasi Murni (APM) nasional tingkat SD/SMP/ sederajat masih belum optimal yaitu untuk SD/ sederajat sebesar 93,73 persen dan SMP/ sederajat sebesar 76,29 persen. Sedangkan rata-rata nasional angka anak putus sekolah usia 7-12 tahun mencapai 0,15 persen atau 39.213 anak, dan anak usia 13-15 tahun sebanyak 0,39 persen atau 38.702 anak yang putus sekolah (Kemendikbud, 2017). Kemudian UNICEF melaporkan bahwa di tahun 2016 ada sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan dasar, yakni sebanyak 600 ribu anak usia Sekolah Dasar dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama. Adapun penyebab utama anak putus sekolah menurut data BPS disebabkan karena masalah ekonomi dan kurangnya minat anak untuk sekolah. Terkait dengan kondisi tersebut, anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu memiliki kemungkinan putus sekolah empat kali lebih besar dari pada mereka yang berasal dari keluarga berkecukupan (Kemensos, 2016).

Kondisi anak putus sekolah di tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama merupakan tantangan dalam pembangunan pendidikan saat ini, yaitu meliputi: 1) bagaimana mempercepat proses peningkatan taraf pendidikan seluruh anak usia sekolah dasar dan menengah untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, terutama bagi anak dari keluarga yang tidak mampu (Bappenas, 2014); 2) bagaimana upaya meningkatkan kinerja pendidikan yang mencakup (a) pemerataan dan perluasan akses pendidikan; (b) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; (c) penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik; dan (d) peningkatan pembiayaan pendidikan (Suryana, 2017). Secara umum tantangan tersebut berhubungan erat dengan kuantitas dan kualitas pendidikan masa depan.

Provinsi Jawa Barat secara kuantitas merupakan salah satu provinsi terbanyak anak usia sekolah dasar dan menengah, namun masih belum optimal dalam memenuhi standar pendidikan berkualitas. Adapun capaian APM Provinsi

Jawa Barat untuk SD/ sederajat sebesar 99,03 persen dan SMP/ sederajat sebesar 77,87 persen, sedangkan angka anak putus sekolah SD/ sederajat yaitu sebesar 0,10 persen atau 4.697 anak dan SMP 0,48 persen atau 8.635 anak. Kemudian angka melanjutkan anak SD ke SMP masih tergolong rendah yaitu sebesar 75,90 persen yaitu jika lulusan SD/ sederajat ada 799.818, maka yang melanjutkan ke SMP/ sederajat yaitu hanya 607.099 anak saja, sedangkan sisanya 192.719 anak tidak melanjutkan sekolah (Kemendikbud, 2017). Hal ini terjadi karena salah satunya disebabkan oleh angka kemiskinan yang ada di kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat masih tergolong tinggi, seperti yang terjadi di Kabupaten Kuningan penyebab anak putus sekolah sebagian besar karena faktor ekonomi.

Menurut data BPS tahun 2016 yang mengacu pada pendataan tahun 2014, angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan termasuk masih tinggi yaitu mencapai 12,72 persen atau sekitar 133.600 orang jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat sebesar 9,18 persen dan rata-rata nasional sebesar 10,98 persen (Kabar Cirebon, 2017). Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kuningan juga termasuk masih rendah, dari 32 kecamatan masih ada sekitar 10 kecamatan yang harus ditingkatkan penanganannya karena termasuk memiliki IPM yang masih rendah, seperti Kecamatan Cibereum, Cimahi, Kalimanggis, Ciawigebang, Cilebak, Karangancana, Selajambe, Ciwaru, Maleber, dan Kecamatan Hantara (Kabar Cirebon, 2017). Sedangkan Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Kuningan yaitu sebesar 98,71 persen, dan rata-rata lama sekolah adalah sebesar 8,64. Hal ini memiliki arti bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Kuningan bersekolah selama 7 sampai dengan 8 tahun yaitu sampai kelas 2 SMP/ Sederajat, sehingga wajib belajar sembilan tahun masih belum tercapai sebagaimana mestinya (BPS Kabupaten Kuningan, 2017).

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan berusaha untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan dengan menyusun kebijakan strategis yang tujuan utamanya untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat. Hal ini tercermin dari kebijakan strategis bidang Pendidikan yaitu sebagai berikut : a) Percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun, b) Peningkatan mutu pendidikan, c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan

pendidikan. Kebijakan strategis tersebut diharapkan dapat menghasilkan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan di sektor pendidikan (Bappeda Kuningan, 2015).

Ketidaktuntasan wajib belajar sembilan tahun dapat terlihat dari rendahnya APK, jumlah sekolah, siswa, lulusan dan *drop out*. Adapun ketuntasan pencapaian wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Kuningan termasuk dalam kategori tuntas madya karena APK Kabupaten Kuningan pada tahun 2015 untuk jenjang SMP/ sederajat masih berada dikisaran 86,24 persen (BPS Provinsi Jawa Barat, 2015). Hal ini disebabkan oleh faktor rendahnya ekonomi orang tua, geografis-demografis, dan sosial budaya (Ulfatin, Mukhadis, & Imron, 2010). Sedangkan permasalahan pengembangan pendidikan pada daerah perdesaan umumnya disebabkan oleh kondisi lingkungan fisik dan sosial yang tidak kondusif (Saifullah, 2016).

Ada banyak upaya yang dapat dilakukan untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun, salah satunya adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah digulirkan oleh Kementerian Sosial sejak tahun 2007. PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak dari keluarga miskin (Kemensos, 2016). Salah satu tujuan PKH adalah untuk meningkatkan partisipasi pendidikan anak dari keluarga miskin, agar mereka dapat mengenyam pendidikan dasar sembilan tahun dan diharapkan dapat melanjutkan pendidikan sampai dua belas tahun.

Dalam pelaksanaannya PKH dilengkapi dengan program pendampingan yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan oleh para pendamping. Oleh karena itu peran pendamping PKH sangat penting dalam melakukan pendampingan sehingga tujuan akhir dari PKH ini dapat tercapai yaitu perubahan perilaku dan sikap KPM terhadap pentingnya pendidikan anak-anak mereka (Habibullah, 2011 & Abelsohn, 2011). Mengingat perannya yang cukup strategis dalam mensukseskan pelaksanaan PKH, maka sebelum menjalankan tugasnya para pendamping PKH diberikan bekal pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis. Sehingga para pendamping memiliki kompetensi yang jelas, pribadi yang berkualitas, dan tertib

administrasi. Hal ini penting, untuk menjadi bekal dalam menjalankan tugasnya, khususnya tugas pendampingan dan pemberdayaan bagi keluarga miskin yang menjadi sasaran dari program keluarga harapan.

Pendampingan ini sangat penting dikarenakan peserta PKH merupakan keluarga sangat miskin tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memperjuangkan hak-hak mereka, kemudian untuk merubah perilaku keluarga agar aktif berpartisipasi dan peduli terhadap pendidikan anak mereka, dan juga untuk memastikan peserta PKH melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan program yang telah ditetapkan (Kemensos, 2016). Mengingat pendampingan program keluarga harapan ini cukup strategis dalam mensukseskan pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun, maka program pendampingan ini perlu dikelola secara profesional agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Manajemen sangat diperlukan dalam pelaksanaan pendampingan Program Keluarga Harapan, karena sebuah program jika tidak dikelola dengan baik maka hasilnya pun kemungkinan besar tidak akan tercapai sesuai harapan.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan, khususnya di bagian Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) yang mengacu pada laporan hasil pemutakhiran data bulan oktober tahun 2017, menyatakan bahwa target pencapaian anak sekolah peserta PKH masih belum memenuhi target 100 persen, akan tetapi baru mencapai 71,89 persen, seperti yang terlihat di Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Anak Sekolah Peserta PKH

No	Jumlah KPM	Jumlah Anak Usia 7-15 Tahun	Jumlah Anak Sekolah		Jumlah Anak Putus Sekolah	
			F	%	F	%
1	28.698	42.706	30.703	71,89	12.010	28,11

Sumber: PPKH Kabupaten Kuningan, 2017

Tabel 1.1 ini menjelaskan bahwa angka anak putus sekolah masih tinggi yaitu mencapai 28,11 persen atau sekitar 12.010 anak yang putus sekolah, sedangkan anak yang melanjutkan sekolah yaitu sebanyak 71,89 persen atau sekitar 30.703 anak dari jumlah total anak usia sekolah peserta PKH sebesar 42.706 anak (PPKH Kuningan, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian

target anak sekolah peserta PKH masih belum memenuhi target 100 persen, akan tetapi baru mencapai 71,89 persen. Padahal target pencapaian dari PKH ini adalah setiap anak peserta PKH usia sekolah harus terdaftar di sekolah dan kehadiran anak mencapai lebih dari 85 persen pada setiap bulannya, Namun, jika dilihat dari hasil pencapaian menunjukkan bahwa masih belum mencapai hasil yang optimal, sehingga manajemen pendampingan masih perlu ditingkatkan.

Peran manajemen pendampingan program keluarga harapan sangat strategis di bidang pendidikan, yaitu dapat meningkatkan angka partisipasi anak sekolah dari keluarga tidak mampu, oleh karena itu manajemen pendampingan harus dilakukan secara profesional, sehingga dampak dari bantuan PKH ini menjadi lebih terukur dalam capaian wajib belajar sembilan tahun. Namun, pelaksanaan di lapangan manajemen pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun masih belum terstruktur dengan baik, Dinas Sosial tidak menjalankan fungsi perencanaan melainkan hanya menunggu instruksi dari pusat, fungsi koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan juga masih belum dilakukan secara intensif, dan fungsi pengawasan serta evaluasi masih kurang optimal dilaksanakan, yaitu hanya mengandalkan dari hasil laporan bulanan para pendamping saja, sementara monitoring langsung ke lapangan masih jarang dilakukan. Padahal fungsi-fungsi itu semua merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam setiap proses manajemen.

Manajemen adalah suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya organisasi, yang sering dikenal dengan istilah POAC yaitu *Planning, Organizing, Actuating, Controlling* (Terry, 2005). Sedangkan pendampingan sosial dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan (Suharto, 2010). Dengan demikian, manajemen pendampingan adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pendampingan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mewujudkan wajib belajar sembilan tahun secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu, manajemen pendampingan program keluarga harapan ini sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi anak dari keluarga miskin

untuk mendorong mereka dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun secara efektif dan efisien, sehingga peran manajemen pendampingan program keluarga harapan sangat dibutuhkan dalam mengelola program ini, jika pendampingan program ini dikelola dengan baik, maka akan tercapainya target wajib belajar sembilan tahun sesuai dengan harapan. Namun, jika manajemen pendampingan ini tidak dikelola dengan baik maka kemungkinan besar hasilnya pun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Hasil penelitian Brauw & Hoddinott, Schultz, dan Garcia & Saavedra menyatakan bahwa bantuan tunai bersyarat telah menjadi alat populer untuk mengentaskan kemiskinan di seluruh negara berkembang yang memiliki dampak positif dalam bidang pendidikan, yaitu dapat meningkatkan capaian pendidikan bagi keluarga miskin, dan dapat meningkatkan angka partisipasi anak sekolah (Brauw & Hoddinot, 2011; Schultz, 2004; Garcia & Saavedra, 2017). Bantuan tunai bersyarat ini juga dapat meningkatkan partisipasi murni Sekolah Dasar sebesar 2,2 persen dan terlihat signifikan dalam meningkatkan tingkat partisipasi sekolah tingkat SMP yaitu sebesar 5,4 persen (TNP2K, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan tunai bersyarat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki dampak yang positif dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun.

Kemudian hasil penelitian Zuhara Argawinata juga menunjukkan bahwa diperlukannya manajemen pendampingan untuk meningkatkan hasil atau kompetensi tertentu dalam sebuah program (Zuhara Argawinata, 2016). Oleh karena itu manajemen pendampingan program keluarga harapan ini sangat diperlukan untuk mewujudkan wajib belajar sembilan tahun. Adapun penyebab mengapa pencapaian wajib belajar masih belum optimal, hal tersebut menurut penelitian Ulfatin, Mukhadis, & Imron disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah faktor rendahnya ekonomi orang tua, geografis-demografis, dan sosial budaya (Ulfatin, Mukhadis, & Imron, 2010). Sedangkan permasalahan pengembangan pendidikan pada daerah perdesaan menurut penelitian Saifullah umumnya disebabkan oleh kondisi lingkungan fisik dan sosial yang tidak kondusif (Saifullah, 2016).

Hal ini sesuai dengan penelitiannya Sugianto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi anak putus sekolah adalah karena faktor ekonomi keluarga tidak mampu, rendahnya dukungan orang tua, dan faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi anak putus sekolah (Sugianto, 2017). Kemudian hasil penelitian Dewi, Zukhri, & Dunia juga menunjukkan bahwa ada enam faktor penyebab anak putus sekolah usia pendidikan dasar, yaitu (1) faktor ekonomi, (2) faktor perhatian orang tua, (3) fasilitas pembelajaran, (4) minat anak untuk sekolah, (5) budaya, dan (6) faktor lokasi sekolah. Faktor perhatian orang tua menjadi faktor yang paling dominan yang menjadi penyebab anak putus sekolah pada usia pendidikan dasar (Dewi, Zukhri, & Dunia, 2014). Penelitian selanjutnya yaitu penelitian Ulfatin mengenai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun, ditemukan bahwa penyebabnya antara lain: (1) masyarakat memiliki ekonomi yang lemah, (2) sosial budaya masyarakat yang kurang mendukung, (3) kurangnya sarana pendidikan, (4) rendahnya kualitas dan dedikasi guru, (5) letak geografis yang sulit dijangkau, (6) keterbatasan informasi, dan (7) persepsi masyarakat yang menganggap kurang penting pendidikan bagi dirinya sendiri (Ulfatin N. , 2003).

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan manajemen pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dilaksanakan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Kuningan, yang akan dituangkan dalam sebuah tesis, yang berjudul *“Manajemen Pendampingan Program Keluarga Harapan dalam Mewujudkan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kabupaten Kuningan”*.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan partisipasi anak usia sekolah dari keluarga miskin untuk mengikuti wajib belajar sembilan tahun. Pelaksanaan PKH ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya peran pendamping sebagai pelaksana PKH yang bertugas di tingkat kecamatan, yang berusaha untuk menjalankan fungsi manajemen dalam

proses pendampingan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mewujudkan wajib belajar sembilan tahun. Oleh karena itu, peran pendamping dalam menjalankan fungsi manajemen ini sangat penting untuk melaksanakan pendampingan Program Keluarga Harapan di tingkat paling bawah yaitu kecamatan.

Manajemen pendampingan menjadi salah satu indikator yang dapat menentukan keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan wajib belajar sembilan tahun bagi anak dari keluarga miskin. Manajemen pendampingan dapat dilihat dari sejauhmana pendamping dapat merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan yang menggunakan sumber daya tertentu untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Adapun salah satu tujuan program keluarga harapan adalah untuk mewujudkan penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Manajemen pendampingan yang belum optimal akan berdampak kepada partisipasi pendidikan anak dari KPM, sehingga manajemen pendampingan ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, yaitu penuntasan wajib belajar sembilan tahun.

Berdasarkan hal tersebut, muncul pertanyaan bagaimanakah pelaksanaan manajemen pendampingan Program Keluarga Harapan yang telah dilaksanakan pendamping dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Kuningan? Apabila fungsi manajemen pendampingan ini dilaksanakan dengan baik, maka diharapkan tujuan penuntasan wajib belajar sembilan tahun dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu diperlukan suatu penilaian atau evaluasi manajemen pendampingan PKH dalam upaya mewujudkan wajib belajar sembilan tahun bagi anak peserta PKH, apakah pelaksanaan fungsi manajemen tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum optimal.

Dari permasalahan di atas, maka fokus penelitian ini diarahkan pada aspek-aspek sebagai berikut:

1. Persiapan pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun.
2. Pelaksanaan pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun.

3. Kendala pelaksanaan pendampingan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun.
4. Hasil pendampingan keluarga harapan yang telah tercapai.
5. Upaya peningkatan kinerja pendampingan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Secara umum rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *“Bagaimanakah Pelaksanaan Manajemen Pendampingan Program Keluarga Harapan Dalam Mewujudkan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kabupaten Kuningan?”*. Secara khusus, rumusan pertanyaan penelitian ini dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persiapan pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Kuningan?
3. Apakah kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pendampingan untuk mewujudkan wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Kuningan?
4. Bagaimanakah pencapaian hasil pendampingan yang telah dilaksanakan oleh pendamping dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Kuningan?
5. Bagaimanakah upaya peningkatan kinerja pendampingan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Kuningan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai manajemen pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Kuningan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran tentang:

1. Bagaimana persiapan dalam pelaksanaan pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Kuningan.
2. Bagaimana pendamping melaksanakan pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Kuningan.
3. Kendala apa saja yang dihadapi pendamping dalam melaksanakan pendampingan untuk mewujudkan wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Kuningan.
4. Bagaimana pencapaian hasil pendampingan yang telah dilaksanakan oleh pendamping program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Kuningan.
5. Bagaimana upaya peningkatan kinerja pendampingan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Kuningan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan Administrasi Pendidikan yang berkaitan dengan manajemen pelatihan, ekonomi dan pembiayaan pendidikan, dan manajemen sumber daya manusia khususnya yang mencakup manajemen pendampingan dalam mewujudkan partisipasi keluarga miskin untuk mengikuti wajib belajar sembilan tahun.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya manajemen pendampingan program keluarga harapan untuk meningkatkan partisipasi keluarga miskin dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan kajian dan pengembangan terkait dengan manajemen pendampingan program keluarga harapan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dasar sembilan tahun.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dari aspek praktik, diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan alternatif sudut pandang atau solusi untuk memecahkan masalah dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dasar sembilan tahun di Kabupaten Kuningan.
2. Dari aspek kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan mengenai manajemen pendampingan program keluarga harapan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dasar sembilan tahun.
3. Bagi Dinas Sosial, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka merancang pola manajemen pendampingan program keluarga harapan yang efektif dan efisien dalam meningkatkan partisipasi pendidikan keluarga miskin di Kabupaten Kuningan.

1.5 Struktur Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis penelitian ini disesuaikan dengan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 6411/UN40/HK/2016 tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun Akademik 2016 (Universitas Pendidikan Indonesia, 2016). Tesis ini terdiri dari 5 (lima) Bab, yaitu:

Bab I menjelaskan tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur penulisan tesis.

Bab II menjelaskan tentang kajian pustaka, yang mencakup konsep manajemen, konsep program, konsep pendampingan, konsep pendidikan, kebijakan wajib belajar, teori motivasi, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian.

Bab III menjelaskan tentang metodologi penelitian, yang mencakup desain penelitian, sumber data dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, proses pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data penelitian dan kisi-kisi instrumen penelitian.

Bab IV menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup gambaran profil program keluarga harapan di Kabupaten Kuningan,

gambaran tentang persiapan pendampingan, pelaksanaan pendampingan, kendala pendampingan, hasil pendampingan, dan upaya peningkatan kinerja pendampingan.

Bab V menjelaskan tentang kesimpulan dan implikasi serta rekomendasi yang diusulkan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bab hasil penelitian dan pembahasan.